



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAT RAMADHAN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 467576

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.010.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 750.000.000
5. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/154 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **308.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, HONDA HR V RU5 1.8 RS CVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N46L O A/T/ SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.568.458
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.325.068.458
III. HUTANG	Rp.	2.633.017.722
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-307.949.264

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.